



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) NO. 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU

*Disusun dan Dianjurkan Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan
Tugas-Tugas Akademika Dan Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)*



Oleh :

PUTRI SUNDARY
01770423585

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2020



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : PUTRI SUNDARY
NIM : 01770423585
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) NO. 02
TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU

Setelah kami teliti dan memberikan bimbingan sebagaimana mestinya, maka kami berpendapat bahwa tugas akhir ini di setujui.

Pekanbaru, 22 April 2020
 DISETUJUI OLEH
 PEMBIMBING

Anna Nurlita, SE, M.Si
 NIK. 130717123

MENGETAHUI,

DEKAN

KETUA JURUSAN

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

Faiza Mukhlis, SE, M.Si. Ak
 NIP. 19741108 200003 2 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : PUTRI SUNDARY
NIM : 01770423585
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR
 AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) NO. 02
 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT
 JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU

HARI/TANGGAL : Selasa, 19 Mei 2020

DISAHKAN OLEH

TIM PENGUJI

KETUA PENGUJI

Prof. Dr. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, AK. CA
NIP. 19751112 199903 2 001

PENGUJI I

Febri Rahmi, SE, M. Sc., Ak, CA
NIP. 19720209 200604 2 002

PENGUJI II

Identi, SE, M. Ak, Ak, CA
NIP. 19690623 200901 2 004

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP) NO. 02 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU

OLEH :

PUTRI SUNDARY
01770423585

Pemerintahan memerlukan anggaran yang dapat dipergunakan untuk kegiatan pada waktu yang akan datang. Tercapainya realisasi atas anggaran dalam Kementerian/Lembaga merupakan hal yang penting diketahui oleh masyarakat saat ini karena masyarakat dapat menilai langsung kinerja dari lembaga pemerintahan negara dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggarannya. Untuk mengetahui kinerja dan ketaatan terhadap penggunaan APBN/APBD, Kementerian/Lembaga wajib menyusun laporan keuangan atas bagian anggarannya yang dikenal dengan Laporan Realisasi Anggaran. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2019 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau yang berada di Jalan Jenderal Sudirman No. 249 Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Laporan Realisasi Anggaran yang disusun oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu suatu cara menganalisa dengan membandingkan data yang sudah ada dengan teori yang sudah diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau sudah terrealisasi dengan baik dan Kanwil Perbendaharaan sangat memanfaatkan anggaran yang tersedia karena tidak ada realisasi anggaran yang melebihi dari yang dianggarkan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun sudah sesuai dengan PSAP 02 dalam PP No.71 Tahun 2010.

Kata Kunci : APBN, APBD, Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Realisasi Anggaran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kenistaan dan kebodohan ke alam yang penuh dengan kedamaian dan kebaikan yaitu Islam yang kita miliki seperti sekarang ini.

Puji syukur atas nikmat dan hidayah yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan judul: **“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) NO. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau ”.**

Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat dalam menyelaikan studi Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis banyak sekali mendapatkan perhatian, bantuan, bimbingan, motivasi, serta masukan-masukan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa Terimakasih yang sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof, Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag. selaku Rektor UIN Suska Riau beserta Staf.

2. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, beserta Pembantu Dekan I, II dan III.

3. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak, selaku Ketua Jurusan D-III Akuntansi, yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan untuk penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ibu Febri Rahmi, SE, M.Sc, Ak, CA selaku sekretaris jurusan yang telah memberi kemudahan kepada penulis dalam berurusan.

Ibu Anna Nurlita, SE, M.Si selaku dosen pembimbing dalam penulisan tugas akhir ini, yang senantiasa meluangkan waktu, ilmu, motivasi serta dorongan dan masukannya kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ibu Identiti, SE, M. Ak, Ak, CA selaku Pembimbing Akademis, yang senantiasa memberikan bimbingan pada bidang akademis selama perkuliahan.

Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang senantiasa memberikan banyak Ilmu kepada penulis.

8. Bapak Ruzdi, Pegawai bidang PPA I dan seluruh Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, yang senantiasa membantu kelancaran dalam penulisan Tugas Akhir ini dan memberikan bimbingan sehingga penulis dapat mengumpulkan data yang diperlukan.

9. Ayahanda Misran dan Ibunda Nurhailis tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, do'a, motivasi, dan dorongan kepada penulis serta selalu menjadi motivasi utama dalam hidup. Tidak lupa juga penulis ucapkan terimakasih kepada abang dan adik tersayang Ari, Yoga, Yogi dan Farhan yang selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Sahabat terbaik Dhea Rezky Zulyana, Dianah Sabila, Chelsi Nizara, Vegi Amara yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan serta selalu meluangkan waktunya untuk menemani penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Sahabat seperjuangan angkatan 2017 Jurusan D-III Akuntansi Waras Umbaran, Rengki Kusuma, Mhd Afriyan Min Shadri, Hidayatullah Maolana, Indah, Rafiqah, Ocha, Agnes, Tina, teman-teman Defacta dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. terima kasih atas kebersamaannya selama perkuliahan.

11. Kakak Tifa, Intan, Nurfaizah, Kakak Ayu, Maydea yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan sebagai insan yang memiliki keterbatasan serta kekurangan, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan dan penulisannya. Untuk itu, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan Tugas Akhir selanjutnya. Namun penulis tetap sangat berharap bahwa Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 19 Mei 2020

Penulis

PUTRI SUNDARY

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

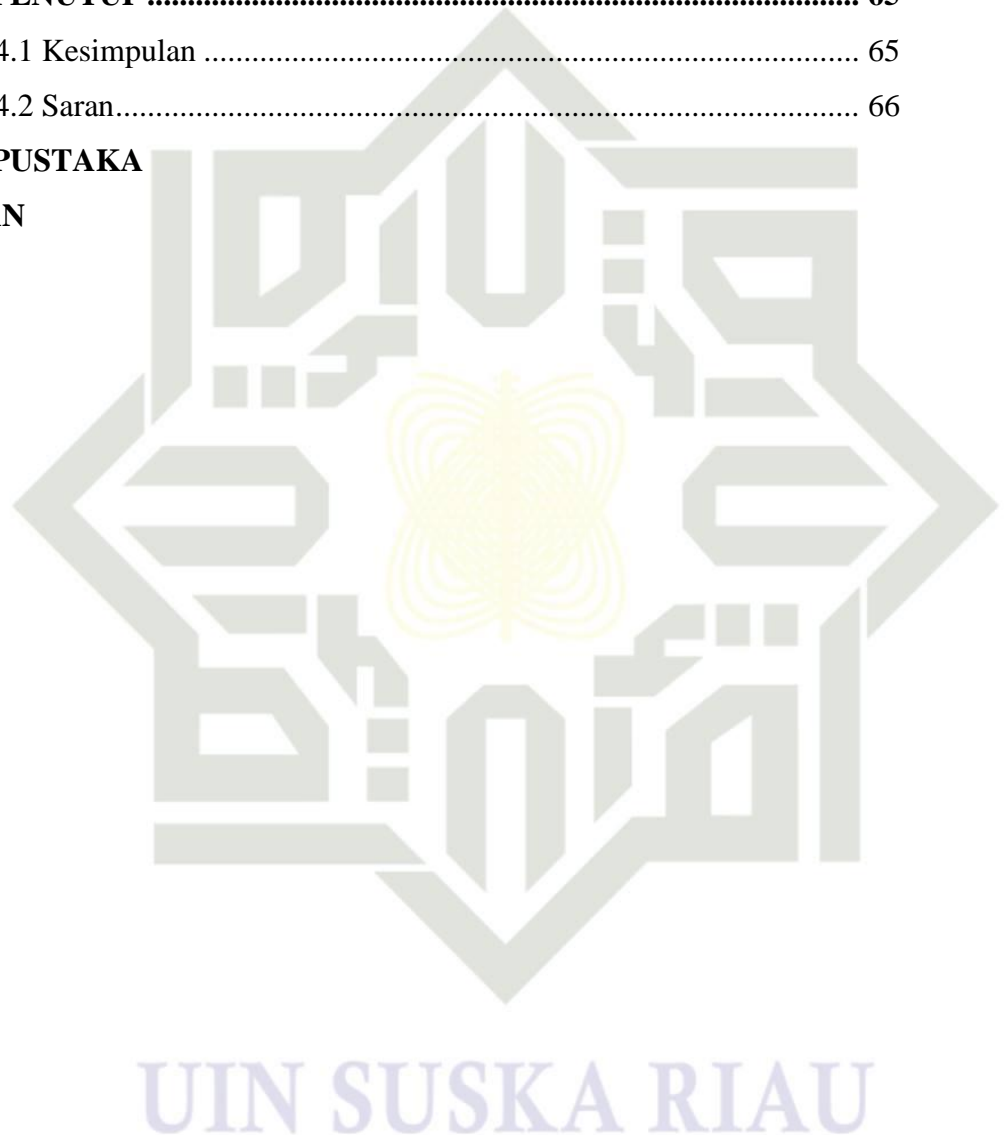
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.5 Teknik Pengumpulan Data.....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	11
2.1 Sejarah Kanwil Direktorat Perbendaharaan Provinsi Riau	11
2.2 Visi dan Misi	13
2.3 Struktur Organisasi.....	14
2.4 Tugas dan Wewenang	16
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK.....	26
3.1 Tinjauan Teori.....	26
3.1.1 Akuntansi Sektor Publik	26
3.1.2 Standar Akuntansi Pemerintah.....	28
3.1.3 Pengertian Anggaran.....	30
3.1.4 Fungsi Anggaran	33
3.1.5 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02	36
3.1.6 Ruang Lingkup Laporan Realisasi Anggaran	36
3.1.7 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran	37
3.1.8 Manfaat Laporan Realisasi Anggaran	39
3.1.9 Struktur Laporan Realisasi Anggaran	40
3.1.10 Periode Pelaporan.....	41
3.1.11 Anggaran dalam pandangan Islam	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Tinjauan Praktik.....	44
3.2.1 Isi Laporan Realisasi Anggaran	44
3.2.2 Informasi yang disajikan dalam LRA atau dalam Calk	46
3.2.3 Analisis Anggaran.....	52
3.2.4 Analisis Penerapan Penyajian LRA dengan PSap 02	61
BAB IV PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

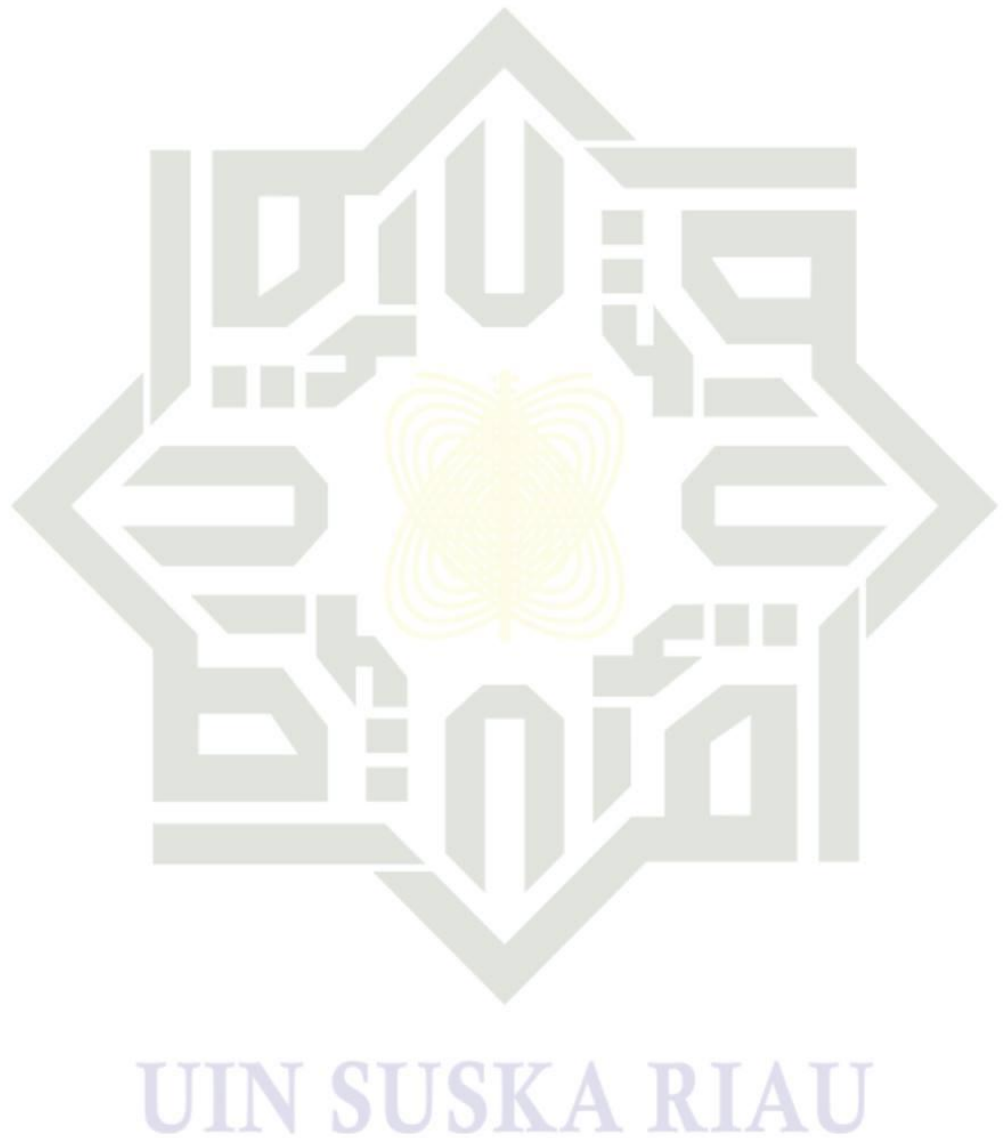


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Stuktur Organisasi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau.....	15
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Perubahan Anggaran.....	53
Tabel 3.2 Tabel Jurnal Basis Kas Pada Akun Pendapatan di Kanwil Perbendaharaan	54
Tabel 3.3 Tabel Jurnal Basis Akrua Pada Akun Pendapatan di Kanwil Perbendaharaan	54
Tabel 3.4 Tabel Jurnal Basis Kas Pada Akun Pendapatan di BUN	54
Tabel 3.5 Tabel Jurnal Basis Kas Pada Akun Belanja di Kanwil Perbendaharaan.....	56
Tabel 3.6 Tabel Jurnal Basis Akrua Pada Akun Belanja di Kanwil Perbendaharaan.....	56
Tabel 3.7 Tabel Jurnal Basis Kas Pada Akun Belanja di BUN	56
Tabel 3.9 Tabel Jurnal Transaksi Non Tunai dengan Kartu Kredit Pemerintah	60
Tabel 3.9 Tabel Jurnal saat diterbitkan SP2D oleh KPPN.....	61
Tabel 3.10 Penyajian Penerapan Laporan Realisasi Anggaran Kanwil Perbendaharaan Tahun 2019 dengan PSAP No. 02	61



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era sekarang, pemerintah semakin berlomba-lomba untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Hal itu biasa disebut dengan nama good governance. Tuntutan dari masyarakat semakin mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan demi mewujudkan pemerintahan yang baik.

Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan good governance yakni pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus menerapkan transparansi dan akuntabilitas publik. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Nordiawan, Putra, dan Rahmawati, 2010: 123).

Setiap negara memiliki memiliki standar akuntansi yang berbeda-beda yang digunakan sebagai acuan dalam pembuatan dan penyusunan laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) disusun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Tujuan diberlakukannya hal tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka pemerintah pusat maupun daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diterapkan di lingkup pemerintahan, baik pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintah daerah. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada meningkatnya kualitas pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi dan akuntabilitas (Nordiawan, Putra, dan Rahmawati, 2010: 123).

Di Indonesia standar akuntansi pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Halim Dan Kusufi, 2014: 228). Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja Pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh PP No. 24 Tahun 2005 adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwajibkan penggunaan akuntansi berbasis akrual oleh Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual yang ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 terdiri atas Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), PSAP tentang laporan keuangan pemerintah terdiri dari:

1. PSAP 01: Penyajian Laporan Keuangan
2. PSAP 02: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Berbasis Kas
3. PSAP 03: Laporan Arus Kas
4. PSAP 04: Catatan atas Laporan Keuangan
5. PSAP 12: Laporan Operasional

Salah satu unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintahan yaitu Laporan Realisasi Anggaran. Tercapainya realisasi atas anggaran dalam Kementerian/Lembaga merupakan hal yang penting diketahui oleh masyarakat saat ini karena masyarakat dapat menilai langsung kinerja dari lembaga pemerintahan negara dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggarannya. Untuk mengetahui kinerja dan ketaatan terhadap penggunaan APBN/APBD, Kementerian/Lembaga wajib menyusun laporan keuangan atas bagian anggarannya yang dikenal dengan Laporan Realisasi Anggaran.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02, Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Yang membedakan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan pemerintah yaitu pada Laporan Realisasi Anggaran. Dalam laporan keuangan komersial tidak terdapat Laporan Realisasi Anggaran.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran menyajikan tujuan laporan realisasi anggaran, manfaat laporan realisasi anggaran, penyajian laporan realisasi anggaran disusun dan disajikan menggunakan akuntansi berbasis kas, struktur laporan realisasi anggaran, periode pelaporan dan unsur laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos antara lain: pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, serta telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD) dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Laporan Realisasi Anggaran masih menggunakan basis kas, karena penetapan anggarannya masih berbasis kas juga. Sedangkan laporan yang memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan disebut Laporan Operasional (LO) berbasis akrual. Yang terceminan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laporan Realisasi Anggaran tidak memiliki keterkaitan dengan neraca dan hanya mempengaruhi Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih/Sisa Anggaran Kurang (SAL). Sedangkan penyusunan Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang mana surplus/deficit Laporan-LO yang dihasilkan dari LO akan dipindahkan ke dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan menjadi penambah atau pengurang ekuitas sehingga akan menghasilkan nilai ekuitas akhir. Ekuitas akhir tersebut akan menjadi nilai ekuitas pada neraca.

Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dan akan memengaruhi SAL pada Laporan Perubahan SAL. Jadi, selama tidak ada aliran kas yang masuk ke dalam Rekening Kas Umum Negara/Daerah maka tidak ada pendapatan yang diakui. Sedangkan Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, dan pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi dan akan memengaruhi ekuitas yang ada di neraca melalui perubahan ekuitas. Hal ini berarti pendapatan-LO lebih luas daripada pendapatan-LRA yang hanya berupa penerimaan kas saja, serta keterkaitannya dengan laporan keuangan yang berbeda.

Sama halnya dengan pendapatan, penerapan dua basis akuntansi tersebut juga berdampak pada penggunaan istilah “belanja” untuk LRA dan “beban” untuk LO. beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban yang diakui pada saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya Kas dari Kas Umum Negara/Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
Satehlaic U niversity of S eitar
Syarif Kasim Riau

Contohnya adalah tagihan rekening listrik dan telepon. Sedangkan Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau adalah Kementerian/Lembaga yang wajib menyusun Laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran merupakan laporan keuangan yang sangat penting bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau karena dapat memberikan gambaran mengenai kinerja dan menunjukkan ketaatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau terhadap APBN. Oleh karena itu, Laporan Realisasi Anggaran yang telah disusun harus dianalisis sehingga memberikan informasi yang berguna bagi pengguna anggaran.

Dengan uraian diatas maka penulis ingin meneliti bagaimana penerapan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang di sajikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau berdasarkan PSAP Nomor 02 yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengangkat judul penelitian **“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah penerapan Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau sudah sesuai dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, Adapun yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah laporan realisasi anggaran yang disusun dan disajikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau sudah sesuai atau belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Sebagai masukan dengan penelitian ini, peneliti dapat menambah wawasan untuk mengetahui kesesuaian penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Povinsi Riau dan sebagai salah satu proses bagi penulis untuk meningkatkan keterampilan dalam pembuatan tugas akhir

2. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Povinsi Riau

Sebagai bahan masukan membahas kembali tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tentang Laporan Realisasi Anggaran.

3. Bagi Pembaca dan Pihak Lainnya

Diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak peneliti selanjutnya di bidang Ilmu Akuntansi pada umumnya dalam menganalisis Pernyataan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau Riau yang berada di Jalan Jenderal Sudirman No. 249 Pekanbaru. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada 13 Maret 2020 sampai 22 April 2020.

1.4.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer yaitu berupa data yang diperoleh dari pegawai dan pihak lain-lain intern dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau.
2. Data Sekunder yaitu data yang sudah diolah dan disajikan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau yang sudah jadi seperti sejarah umum dan struktur organisasi, deskripsi jabatan dan pembagian masing-masing tugas.

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai karyawan kantor dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Riau yaitu Bapak Ruzdi sebagai Bendahara Kanwil Perbendaharaan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan tugas akhir.

2. Dokumentasi, yaitu dengan mengutip data secara langsung yang dimiliki oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau seperti Laporan Realisasi Anggaran.
3. Studi pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.

2.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar dalam memberikan gambaran yang menyeluruh dalam penyusunan dan pembahasan penelitian ini, maka dalam penulisan Tugas Akhir ini akan dibagi menjadi 4 (empat) Bab. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini merupakan bab yang berisikan tentang gambaran umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau yang terdiri dari sejarah singkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, struktur organisasi, visi misi dan uraian tugas structural instansi.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Bab ini merupakan bab yang menguraikan teori yang terkait dengan judul penelitian yang penulis bahas. Membahas mengenai pengertian akuntansi sektor publik, pengertian standar akuntansi pemerintahan, pengertian anggaran, fungsi anggaran, PSAP No. 02, dan anggaran dalam pandangan islam.

BAB IV KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal perbendaharaan Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut Kanwil DJPBN Provinsi Riau, didirikan pada bulan April 1999 bergabung atau dibawah oleh Kanwil Sumatera Barat. Sebelumnya Kanwil Ditjen Perbendaharaan ini bernama Kanwil IV. Kanwil Ditjen Perbendaharaan ini tidak terlepas dari konsekuensi pelaksanaan reformasi penyempurnaan manajemen keuangan negara di Indonesia. Ketika semangat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) digulirkan, Pemerintah Pusat menempuh langkah perubahan melalui reformasi hukum dan reformasi organisasi. Secara paralel, reformasi hukum yang ditandai dengan lahirnya Paket Undang-undang Bidang Keuangan Negara diiringi dengan perubahan organisasional di tubuh Kementerian Keuangan guna menyelaraskan perangkat organisasi dengan penegasan fungsi Kementerian keuangan selaku institusi pengelola fiskal.

Selaku institusi pengelola fiskal, Kementerian Keuangan membagi pemisahan kewenangan, yang antara lain adalah fungsi-fungsi pengkajian, penganggaran, dan perbendaharaan. Inilah alasan kuat terjadinya penyempurnaan organisasi (reorganisasi) dengan terbentuknya 3 (tiga) organisasi dengan nomenklatur baru, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan Perimbangan Keuangan (Ditjen APK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan), dan badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerja Sama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Internasional (BAPEKKI). Suatu perubahan organisasi yang ditandai dengan memisahkan fungsi-fungsi yang berbeda namun berada dalam suatu naungan organisasi, serta menyatukan fungsi-fungsi yang sama tersebar di berbagai unit.

Ditjen Perbendaharaan sendiri bukanlah organisasi yang sama sekali baru. Fungsi utamanya tersebar di berbagai unit Eselon I dengan fungsi paling dominan, yaitu fungsi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, pengelolaan barang milik kekayaan negara, dan pengelolaan hutang luar negeri yang berada di bawah unit eselon I DJA. Sementara itu, fungsi perbendaharaan lainnya tersebar di beberapa unit Eselon I dan Eselon II yaitu fungsi pengelolaan hutang dalam negeri pada Pusat Manajemen Obligasi Negara (PMON), pengelolaan penerusan pinjaman dan pengelolaan kasnya pada Ditjen Lembaga Keuangan (Ditjen LK), dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN), serta fungsi pengolahan data pada Kantor Pengolahan Data Informasi Keuangan Regional (KPDIKR) BINTEK.

Selanjutnya, dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2004 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004 dan Nomor 303/KMK/2004, secara hukum meleburlah unit-unit pengelola fungsi perbendaharaan tersebut menjadi satu Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang terdiri dari 1 Sekretariat Ditjen dan 7 Direktorat Teknis pada kantor pusat serta 33 Kanwil DJPBN dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada kantor instansi vertikal.

Pelantikan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan seluruh pejabat Eselon II pada bulan Oktober 2004 pun menjadi titik awal sinergi organisasi baru tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hingga kini, telah terjadi beberapa kali pergantian pejabat Eselon II dan jajaran di bawahnya. Selanjutnya, dengan diterbitkannya peraturan menteri keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Wilayah Jenderal Perbendaharaan, Kanwil DJPBN mempunyai tugas dan fungsi baru dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Visi dan Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau

1. Visi

“Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia” (*To be a world-class state treasury manager*).

2. Misi

- a. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal (*To achieve prudent, efficient, and optimum cash dan fund investment management*).
- b. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel (*To support timely, effective, and accountable budget execution*).
- c. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu (*To achieve accountable, transparent, and timely state finance accounting and reporting*).
- d. Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang handal, profesional, dan modern (*To develop reliable, professional, and modern treasury support system*).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.3. Hak cipta milik UIN Suska Riau

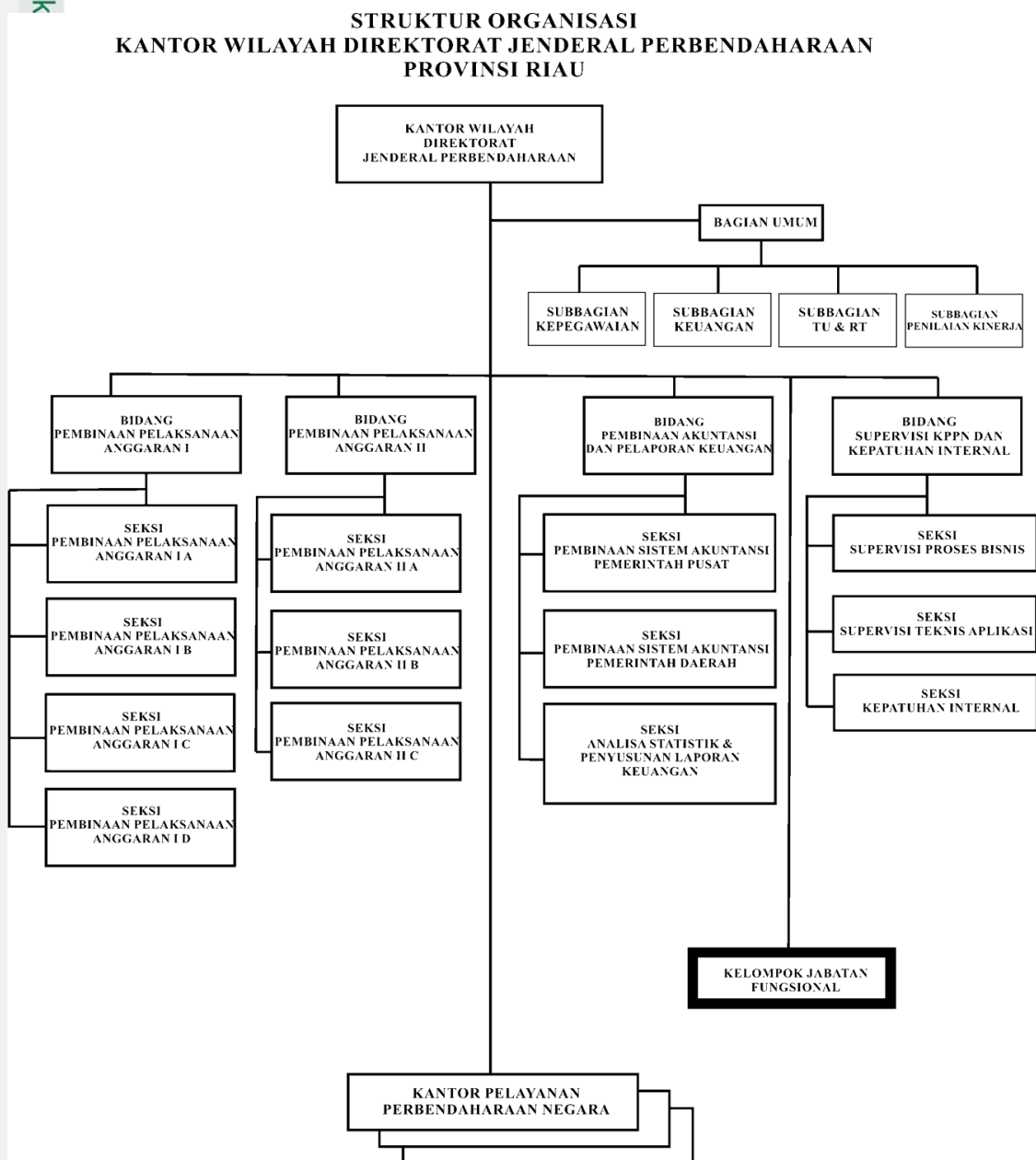
Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka atau bagian yang penggarisan atau penetapan tugas, tanggung jawab dan wewenang atas setiap fungsi yang harus dijan oleh orang-orang berada didalam organisasi tersebut. Dari struktur organisasi terlihat pembagian dan pendistribusian tugas dari atau setiap orang yang didalamnya secara tegas dan jelas. Sehingga admistrasi dan manajemen mempunyai peran dominan di dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau berbentuk staff dan lini.

Struktur organisasi ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaanlain karena menunjukkan tingkat perintah dari atasan kepada baahannya dan tingkat tanggungjawab dari bawahan ke atasannya. Struktur organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau berikut ini :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kanwil DJPB Provinsi Riau



Sumber : Kanwil DJPB Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.4 Tugas dan Wewenang

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau dipimpin oleh kepala kantor dan dibantu oleh bagian umum dan seluruh bidang. Untuk lebih rincinya tugas dan wewenang masing-masing dari struktur organisasi Kanwil Dirjen Perbendaharaan terdiri atas:

1. Kepala kantor

Pemimpin serta penanggung jawab, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, pengawasan, serta kebijaksanaan kepada semua bidang supaya terbentuknya kerjasama yang efisien dalam tercapainya tujuan kerja.

2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi, dukungan sarana dan prasarana kerja, urusan kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (PSDM), keuangan, tata usaha, rumah tangga dan kehumasan, keterbukaan informasi publik (KIP), protokoler pimpinan, dan pengelolaan kinerja. Bagian Umum memiliki beberapa subbagian yaitu:

a. Subbagian Kepegawaian

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan pegawai, dan pengembangan sumber daya manusia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Subbagian keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan RKA-KL, urusan kebendaharaan, pengujian SPP dan penerbitan surat perintah membayar, akuntansi dan pelaporan keuangan.

c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, program dan laporan kegiatan, pengadaan barang. dan jasa, pembuatan komitmen, pengujian tagihan, pengajuan permintaan pembayaran, perlengkapan dan rumah tangga, urusan tata usaha, kehumasan, protokoler pimpinan, pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik serta kompilasi dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan.

d. Subbagian Penilaian Kinerja

Subbagian Penilaian Kinerja mempunyai tugas melakukan pengelolaan kinerja yang meliputi penyusunan sasaran strategis dan indikator kinerja, pemantauan, penilaian, evaluasi dan pelaporan kinerja.

3. Bidang Pembina Pelaksanaan Anggaran I

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I A, I B, I C, dan I D masing-masing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengesahan revisi DIPA, pembinaan dan pembimbing teknis penganggaran dan pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat, pengelolaan keuangan BLU dan manajemen investasi, dan monitoring dan evaluasi kinerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penganggaran dan pelaksanaan anggaran pemerintah pusat, serta penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran belanja pemerintah pusat yang pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal.

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring pengelolaan dan pelaksanaan anggaran belanja daerah, koordinasi pemantauan realisasi penggunaan dana transfer, dan fasilitas penyampaian informasi keuangan daerah, serta penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran belanja daerah. Dalam melaksanakan tugas pembinaan. Bidang pembinaan pelaksanaan anggaran seksi I menyelenggarakan fungsi:

- a. Kompilasi dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan dokumen pelaksanaan anggaran daerah.
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah.
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran belanja daerah.
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan pengelolaan kas daerah.
- e. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan BLU daerah.
- f. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis manajemen dan monitoring dan evaluasi investasi daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Penyiapan bahan monitoring pelaksanaan anggaran belanja dan pemantauan atas penerimaan dana transfer di daerah dalam rangka *Spending Review*.
- h. Koordinasi pemantauan laporan realisasi penggunaan dana transfer.
- i. Fasilitas penyiapan informasi keuangan daerah, dan
- j. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran belanja daerah.

4. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran daerah, investasi pemerintah, pinjaman, kredit program, dana transfer, dan pelaksanaan anggaran daerah, serta melaksanakan Kajian Fiskal Regional, analisis kinerja anggaran belanja daerah, koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah, serta layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan Kajian Fiskal Regional;
- b. Penyiapan bahan asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran daerah;
- c. Penyiapan bahan asistensi dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi atas investasi pemerintah, pinjaman, dan kredit program di daerah;
- e. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi dana transfer di daerah;
- f. Pelaksanaan fasilitasi penyampaian informasi keuangan daerah;
- g. Penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi dan analisis kinerja anggaran daerah;
- h. Pengoordinasian Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah; dan
- i. Pengoordinasian pelaksanaan layanan Kementerian Keuangan di daerah.

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II terdiri atas :

- a. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A
- b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B
- c. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C

Seksi Pembinaan Pelaksanaan anggaran II A, II B, dan II C masing-masing mempunyai tugas melakukan penyusunan Kajian Fiskal Regional, melakukan asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran belanja daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pelaksanaan anggaran belanja daerah, investasi pemerintah, pinjaman, dan kredit program, melakukan monitoring dan evaluasi dana transfer, investasi pemerintah, pinjaman, dan kredit program, melakukan koordinasi pelaksanaan layanan bersama Kementerian Keuangan, koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah, serta melakukan analisi dan penyusunan laporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan pelaksanaan anggaran daerah yang pembagian tugasnya ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

5. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan keuangan

Bidang pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintah pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, rekonsiliasi, monitoring, dan evaluasi, penyusunan koordinasi laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan pedoman umum sistem akuntansi pemerintah (PUSAP), dan penyusunan statistik keuangan sesuai dengan *Government Finance Statistics* (GFS), serta analisa atau laporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintah pusat.
- b. Meyiapkan bahan bimbingan teknis atau penyuluhan implikasi standar akuntansi pemerintah pada instansi.
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintah daerah.
- d. Penyiapan bahan bimbingan teknis atau penyuluhan implementasi standar akuntansi pemerintah pada instansi daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Penyelenggaraan rekonsiliasi laporan keuangan tingkat unit akuntansi pembantu penggunaan anggaran wilayah (UAPPA-W).
- f. Konsolidasi LKPP tingkat unit akuntansi pembantu penggunaan anggaran wilayah (UAPPA-W).
- g. Penyiapan bahan monitoring dan evaluasi penyusunan LKPP tingkat kuasa BUN.
- h. Penyiapan bahan penyusunan konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan pedoman umum sistem akuntansi pemerintah (GFS), dan
- i. Penyiapan bahan analisis atas laporan keuangan.

Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan memiliki beberapa seksi, yaitu:

- a. Seksi Pembinaan System Akuntansi Pemerintah Pusat
Seksi pembinaan system akuntansi pemerintah pusat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis system akuntansi, melakukan bimbingan teknis atau penyuluhan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan pada instansi pusat.
- b. Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Seksi pembinaan sistem akuntansi pemerintah daerah mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

system akuntansi, melakukan bimbingan teknis atau penyuluhan dalam rangka implementasi standar akuntansi pemerintahan pada instansi daerah.

c. Seksi Analisis, Statistik, dan Penyusunan Laporan Keuangan

Seksi analisis, statistik, dan penyusunan laporan keuangan mempunyai tugas melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan tingkat unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah, penyusunan monitoring, evaluasi, dan konsolidasi penyusunan LKPP Tingkat kuasa BUN, penyusunan konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan pedoman umum system akuntansi pemerintah (PUSAP), dan menyusun statistik keuangan pemerintah sesuai dengan *Government Finance Statistics*, serta analisis atau laporan keuangan.

6. Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal

Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan proses bisnis supervisi, implementasi, dan bimbingan teknis orasional aplikasi pada KPPN penilaian kinerja dan pemenuhan standar tata kelola KPPN, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang supervisi KPPN dan kepatuhan internal menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas kuasa bendahara umum negara pada KPPN
- b. Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelayanan perbendaharaan
- c. Penyiapan bahan penilaian kinerja kppn
- d. Monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola KPPN
- e. Penyiapan bahan supervisi dan implementasi standar prosedur operasi aplikasi SPAN dan SAKTI
- f. Penyiapan bahan bimbingan teknis operasional aplikasi SPAN dan SAKTI
- g. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan kantor wilayah
- h. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan kantor wilayah

Adapun beberapa seksi di Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal yaitu:

- a. Seksi Supervisi Proses Bisnis

Seksi supervisi proses bisnis mempunyai tugas melakukan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas kuasa BUN pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KPPN, pelayanan pembendaharaan dan penilaian kinerja KPPN serta monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola KPPN.

b. Seksi Supervisi Teknis

Seksi supervisi teknis aplikasi mempunyai tugas melakukan pemantauan, supervisi, implementasi, bimbingan teknis operasionalisasi, dan monitoring standarisasi infrastruktur aplikasi pada KPPN.

c. Seksi Kepatuhan Internal

Seksi kepatuhan internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan pengaduan, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta menyiapkan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis dan laporan hasil penindakan kepatuhan internal KPPN.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pelaporan realisasi anggaran yang penulis teliti di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau dilihat dari anggaran dan realisasi belanja sudah terealisasi dengan baik dan Kanwil Perbendaharaan sangat memanfaatkan anggaran yang tersedia karena tidak ada realisasi anggaran yang melebihi dari yang dianggarkan. Realisasi Belanja per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 3.977.792.246 atau mencapai 99% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.017.204.000. Maka dapat dilihat presentase realisasi berada dibawah standar <100% yang artinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau secara umum telah ekonomis dalam membelanjakan belanja negaranya.
2. Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau sudah mengacu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran.
3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau hanya menyajikan komponen Laporan Realisasi Anggaran, yaitu: Pendapatan dan Belanja. Karena untuk Kementerian/Lembaga hanya menyajikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi pendapatan dan belanja. Sedangkan informasi transfer, surplus/deficit dan pembiayaan untuk pemerintah daerah (pemda).

4.2 Saran

Setelah penulis melaksanakan penelitian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau harus mempertahankan pencapaian output anggaran yang sudah baik karena realisasi sudah mencapai 99% dari alokasi anggaran.
2. Dalam perencanaan anggaran harus baik, dengan merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk menerapkan strategi organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga laporan pelaksanaan anggaran dapat dijadikan evaluasi kinerja sehingga dari hasil evaluasi tersebut akan menjadi pertimbangan untuk merumuskan dan merencanakan program dan kegiatan berikutnya.
3. Dalam pelaksanaan anggaran harus diawasi, sehingga anggaran yang disediakan benar-benar telah dikeluarkan dan digunakan sebagaimana semestinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Q.S Al-Furqan ayat 67
- Q.S Al-An'am ayat 135
- Q.S Al- Mudatsir ayat 38
- Artikunto, Suharsimi. 2010. *Anggaran Perusahaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.
- Fauziah Ifat, 2018, *Standar Akuntansi Pemerintah Sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010*, Jakarta: Ilmu.
- Halim, A., dan Kusufi, M. S. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., dan Kusufi, M. S. 2012 . *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hasanah, M., dan Fauzi, A. 2017. *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: IN MEDIA.
- Ikhsan, Arfan. 2009. *Akuntansi Manajemen Perusahaan Jasa*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Isa, Irwan. 2014. *Anggaran Belanja Teknologi Informasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Mahmudi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press .
- Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nafarin, M. 2012. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, Putra, dan Rahmawati. 2012. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samryn, 2013. *Akuntansi Manajemen*, Jakarta: Kencana.
- Siregar, B. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Suparweni, V. W. 2015. *Akuntansi Sektor Publik : Teori Konsep Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

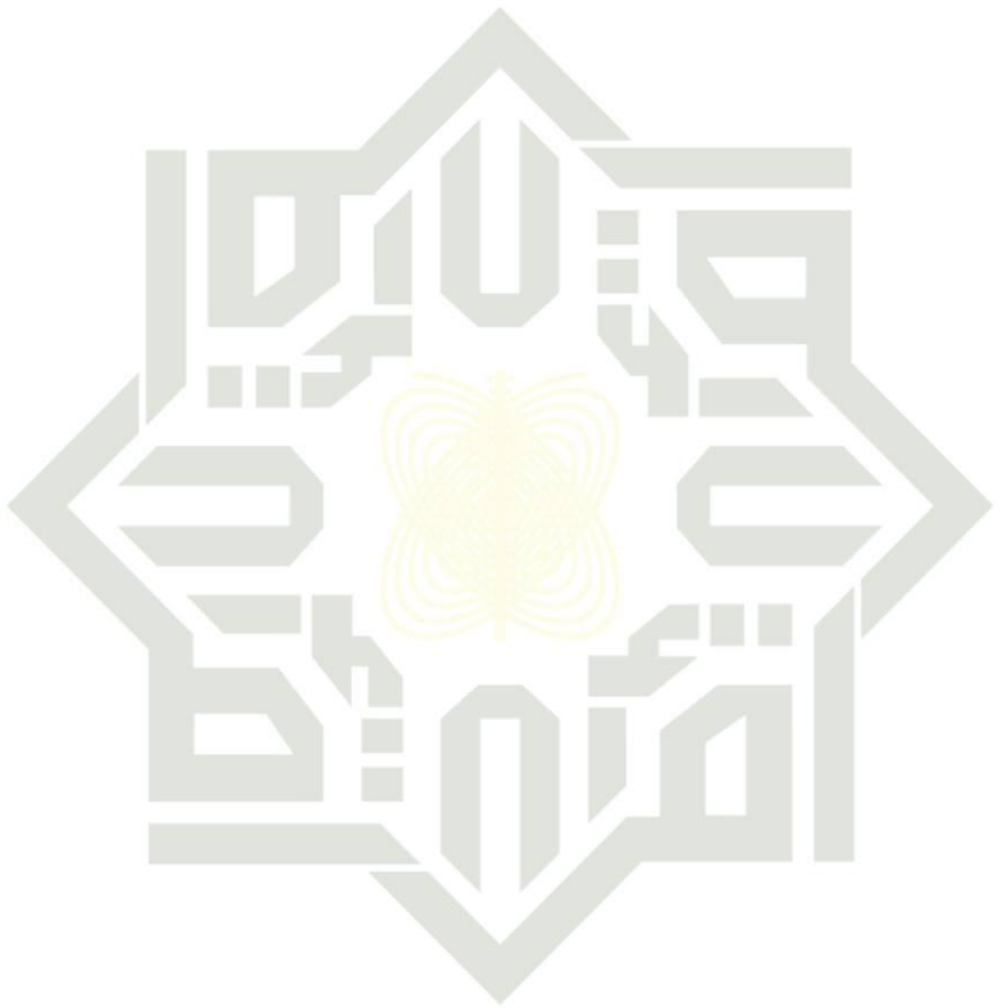
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan sudah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 dalam menyusun dan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran?

Jawaban : Sudah

2. Apa saja pos-pos yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan?

Jawaban : Laporan Realisasi Anggaran hanya menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja. Karena untuk Kementerian/Lembaga hanya menyajikan informasi pendapatan dan belanja. Sedangkan informasi transfer, surplus/deficit dan pembiayaan untuk pemerintah daerah.

3. Di dalam pos pendapatan, ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Apa saja transaksi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2019?

Jawaban : Pada tahun 2019 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kanwil Perbendaharaan berasal dari Pendapatan dari penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 10.000.000 dan Rp 39.020.000

4. Apakah periode pelaporan Laporan Realisasi Anggaran sudah sesuai PSAP? Apakah sudah tepat waktu pelaporannya?

Jawaban : Sudah, Penyajian Laporan Realisasi Anggaran di Kanwil Perbendaharaan sekurang-kurangnya disajikan sekali dalam setahun dan disajikan 1 bulan setelah tahun anggaran, paling lama 3 bulan setelah dari anggaran.

5. Apakah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan kanwil yang belum realisasi secara optimal?

Jawaban: Untuk tahun 2019 semuanya telah tercapai sesuai dengan target yg telah ditentukan dan output telah tercapai meskipun tidak 100%. 90% keatas itu sudah menandakan output yang baik.



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
 ESELON :
 a. Ditjen Perbendaharaan
 WILAYAH/PROVINSI : RIAU 0900
 SATUAN KERJA : KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU 613739

Kode Lap : LRA.F.S
 Tanggal : 22/03/20 8:55 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --

NO	URAIAN	2019				2018			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1		3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	49,020,000	(49,020,000)	0	0	11,573,364	(11,573,364)	0
	PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	49,020,000	(49,020,000)	0	0	11,573,364	(11,573,364)	0
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	585,694,000	579,650,000	6,044,000	99	689,426,000	652,699,000	36,727,000	95
	BELANJA BARANG	3,173,558,000	3,140,191,646	33,366,354	99	3,152,907,000	3,119,382,998	33,524,002	99
	BELANJA MODAL	257,952,000	257,950,600	1,400	100	265,841,000	263,732,000	2,109,000	99
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	4,017,204,000	3,977,792,246	39,411,754	99	4,108,174,000	4,035,813,998	72,360,002	98
C	PEMBAYARAN				0				0



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA LEMBAGA
ESKOR
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

: 015
: 08
: 0900
: 613739

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN
RIAU
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 22/03/20 8:56 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker --

URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
		PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	49,020,000	0	49,020,000	0
JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	49,020,000	0	49,020,000	
JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	49,020,000	0	49,020,000	
JUMLAH PENDAPATAN	0	49,020,000	0	49,020,000	

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
 ESELON I : 08
 WILAYAH/PROVINSI : 004
 SATUAN KERJA : 613739
 JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
 DITJEN PERBENDAHARAAN
 KANWIL RIAU
 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 13/03/20 2:17 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun --rekon17
 Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511129	Belanja Uang Makan PNS	423,624,000	404,700,000	400,741,000	0	400,741,000	99.02	3,959,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	423,624,000	404,700,000	400,741,000	0	400,741,000	99.02	3,959,000
5122	Belanja Lembur							
512221	Belanja Uang Lembur	309,600,000	180,994,000	180,978,000	2,069,000	178,909,000	99.99	2,085,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	309,600,000	180,994,000	180,978,000	2,069,000	178,909,000	99.99	2,085,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	733,224,000	585,694,000	581,719,000	2,069,000	579,650,000	99.32	6,044,000
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	594,952,000	567,498,000	567,153,380	0	567,153,380	99.94	344,620
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	35,000,000	44,000,000	43,974,023	0	43,974,023	99.94	25,977
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	120,960,000	108,600,000	108,600,000	0	108,600,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	233,648,000	452,321,000	439,100,600	0	439,100,600	97.08	13,220,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	984,560,000	1,172,419,000	1,158,828,003	0	1,158,828,003	98.84	13,590,997
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	368,404,000	335,811,000	331,442,840	0	331,442,840	98.7	4,368,160
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	17,700,000	22,450,000	22,450,000	0	22,450,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	386,104,000	358,261,000	353,892,840	0	353,892,840	98.78	4,368,160
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	90,000,000	94,000,000	93,573,800	0	93,573,800	99.55	426,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	90,000,000	94,000,000	93,573,800	0	93,573,800	99.55	426,200
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	280,000,000	235,706,000	235,705,150	0	235,705,150	100	850
522112	Belanja Langganan Telepon	25,000,000	16,039,000	16,038,417	0	16,038,417	100	583
522113	Belanja Langganan Air	1,200,000	0	0	0	0	0	0
522114	Belanja Sewa	5,000,000	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	100	0
522115	Belanja Jasa Profesi	13,000,000	11,800,000	11,750,000	0	11,750,000	99.58	50,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	324,200,000	266,545,000	266,493,567	0	266,493,567	99.98	51,433
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	483,167,000	492,343,000	492,164,700	0	492,164,700	99.96	178,300
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	18,977,000	24,557,000	24,247,000	0	24,247,000	98.74	310,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	396,890,000	303,529,000	302,499,127	0	302,499,127	99.66	1,029,873
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	899,034,000	820,429,000	818,910,827	0	818,910,827	99.81	1,518,173

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 08
WILAYAH/PROVINSI : 004
SATUAN KERJA : 613739
JEMIS SATUAN KERJA : KD

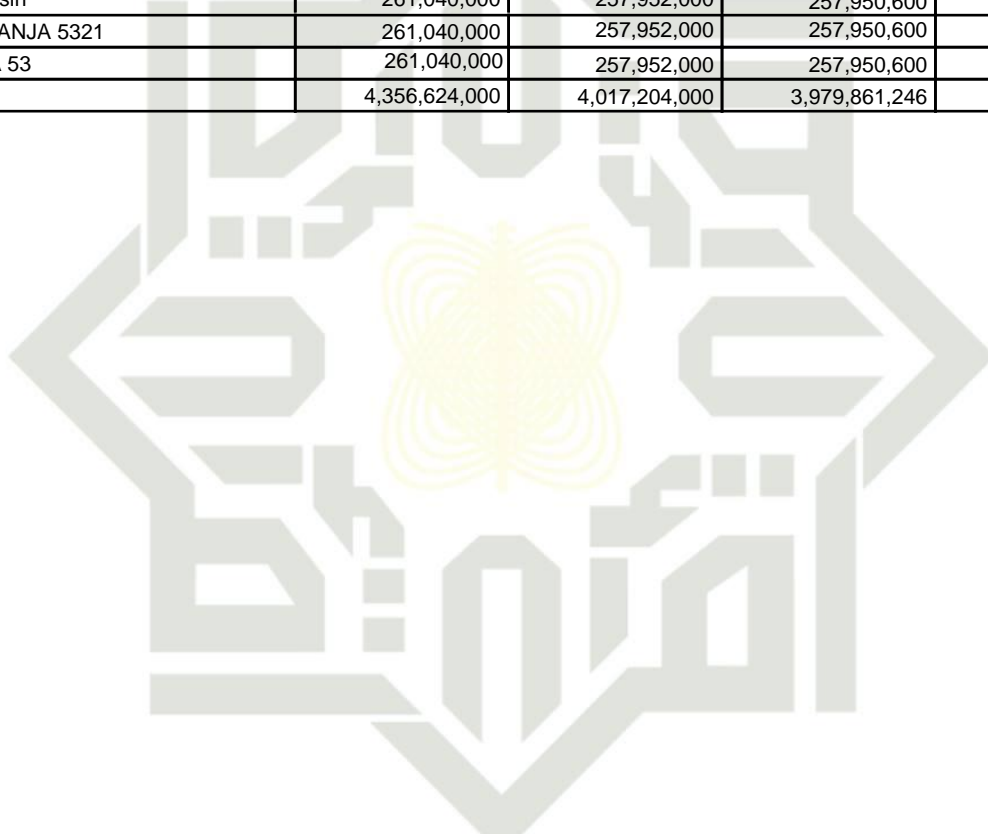
KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN
KANWIL RIAU
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 13/03/20 2:17 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun --rekon17
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
52411	Belanja Perjalanan Biasa	507,788,000	419,274,000	408,292,609	0	408,292,609	97.38	10,981,391
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23,700,000	42,630,000	40,200,000	0	40,200,000	94.3	2,430,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	146,974,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	678,462,000	461,904,000	448,492,609	0	448,492,609	97.1	13,411,391
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	3,362,360,000	3,173,558,000	3,140,191,646	0	3,140,191,646	98.95	33,366,354
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
53211	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	261,040,000	257,952,000	257,950,600	0	257,950,600	100	1,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	261,040,000	257,952,000	257,950,600	0	257,950,600	100	1,400
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	261,040,000	257,952,000	257,950,600	0	257,950,600	100	1,400
	JUMLAH BELANJA	4,356,624,000	4,017,204,000	3,979,861,246	2,069,000	3,977,792,246	99.07	39,411,754

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic U



KEMENTERIAN KEUANGAN
KANWIL DJTJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
DAFTAR DOKUMEN PENERIMAAN BARANG DAN JASA

Nomor SPP : 00139T/613739/2019

No	Nomor Dokumen Tanggal Dokumen	Keterangan	Kode Kegiatan	Kode Output	Kode Akun	Nilai Dokumen
1	00016 28 Oktober 2019 Kanwil Ditjen	Pembelian seminar kit dalam rangka Seminar APBN dan	1706	009	521211	IDR 3.340.438,00
2	00014 23 Oktober 2019 Kanwil Ditjen	Pembelian seminar kit dalam rangka Seminar APBN dan	1706	009	521211	IDR 2.732.256,00
3	00018 30 Oktober 2019 Kanwil Ditjen	Bea Materai tagihan KKP atas pembelian tiket pesawat dalam	1706	009	524111	IDR 6.000,00
4	00015 23 Oktober 2019 Kanwil Ditjen	Pembelian seminar kit dalam rangka Seminar APBN dan	1706	009	521211	IDR 5.160.929,00
5	00017 30 Oktober 2019 Kanwil Ditjen	Bea Materai atas tagihan KKP Pembelian seminar kit dalam	1706	009	521211	IDR 6.000,00
6	00013 10 Oktober 2019 Kanwil Ditjen	Biaya transportasi perjadin an. Arie Suwandani Wiwit W dkk (3	1706	009	524111	IDR 1.362.900,00
JUMLAH						IDR 12.608.523,00

FITMANIZA
NIP:196403111985032001

KEMENTERIAN KEUANGAN
KANWIL DJTJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00139A

Tanggal 06-Nov-2019

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Pekanbaru (008)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 12.608.523,00

**** DUA BELAS JUTA ENAM RATUS DELAPAN RIBU LIMA RATUS DUA PULUH TIGA RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2019
Dasar Pembayaran
DIPA
Nomor : DIPA-015.08.2.613739/2019

Tanggal : 05-Dec-2018
UU NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG
APBN TA 2019

Jenis Tagihan : GUP-KKP
Jatuh Tempo : Segera
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

613739.008.521211.0150809.1706009.A000000001.00000.2.0951.2.000000.000000

11.239.623,00

613739.008.524111.0150809.1706009.A000000001.00000.2.0951.2.000000.000000

1.368.900,00

Jumlah Pengeluaran

12.608.523,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

12.608.523,00

Kepada:

Nomor Supplier : 94922
Nama Supplier : KANWIL DJTJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI RIAU
NPWP1 : 002675106211000
NPWP2 : 002675106211000
NOP :
ALAMAT : Jl. Jend. Sudirman No. 249 Pekanbaru

Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA,
Rekening : 650016137391000
Nama Pemilik : BPG 008 KANWIL DJPB RIAU
Uraian : Penggantian uang persediaan KKP keperluan belanja barang

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

KOTA PEKANBARU, 06 November 2019
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM

FITMANIZA
NIP 196403111985032001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Putri Sundary, di lahirkan di Pekanbaru 06 Oktober 1999. Ayahanda bernama Misran dan Ibunda bernama Nurhailis. Penulis anak keempat dari lima bersaudara.

Jenjang Pendidikan dimulai dari TK Kembang Harapan Pandau Jaya Tahun Ajaran 2004-2005, kemudian tahun 2005 penulis melanjutkan pendidikan di SDN 017 Pandau Jaya dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Kemala Bhayangkari Kota Pekanbaru dari tahun 2011-2014, dan melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Kota Pekanbaru Jurusan Adminitrasi Perkantoran dari 2014-2017. Kemudian pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan D3 Akuntansi.

Dengan berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan Judul “ **Analisis penerapan pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau** ” dibawah bimbingan Ibu Anna Nurlita, SE, M.Si dan pada tanggal 19 Mei 2020 dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dengan nilai Sangat Memuaskan dan menyandang gelar Ahli Madya (A.Md).